



DISKOMINFOSTASAN

*Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Tanah Laut*



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan pada waktunya. LAPKIN tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.

LAPKIN dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LAPKIN ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LAPKIN ini oleh setiap jajaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut.



ITIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP. 19840320 200212 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terdiri 1 Esselon II Kepala Dinas, 4 Esselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, dan Kepala Bidang Komunikasi. Sedangkan Esselon IV sejumlah 4 Jabatan (2 Kepala Sub Bagian dan 2 Kepala Seksi).

Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang merupakan upaya untuk mewujudkan Tujuan “Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”.

Strategi pencapaian tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut secara umum menyesuaikan dengan arah kebijakan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026 berorientasi pada sasaran Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Strategi yang disusun untuk mengembangkan komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam rangka mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu

Peningkatan kualitas SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD terkait maupun perguruan tinggi dalam hal pengembangan *e-government*; Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam proses kerja dan layanan publik dengan sistem data terintegrasi; Meningkatkan cakupan media informasi publik; Melakukan kerjasama kemitraan dan hubungan dengan media komunikasi; Meningkatkan pengelolaan opini dan isu publik daerah; Meningkatkan layanan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatkan pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam menjaga keamanan dokumen; Menyediakan data statistik sektoral daerah; Pembangunan pusat data yang terintegrasi dengan SKPD. Adapun program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Secara garis besar kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada kualitas layanan *e-Government*, yang diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengacu pada Perpres RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai/indeks SPBE yang diperoleh Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 ini sebesar **3,12** dengan predikat penilaian **baik**. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2024 berdasarkan pada 2 sasaran, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pencapaian domain SPBE	64	62,4	97,5%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	81 nilai	82,1 nilai	101,4%

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 dari Anggaran Rp. 15.050.625.689,- terealisasi sebesar Rp. 13.690.453.242,- (90,96%), dan fisik 100%. Realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut sudah tidak ada lagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah dihapuskan. Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2022 yang sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Bimbingan teknis ataupun pelatihan kepada seluruh administrator sistem dan jaringan SKPD serta pelatihan literasi digital guna mendukung pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara berkala per triwulan.
3. Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait pengembangan dan inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	3
D. Cascading Kinerja	6
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	9
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	16
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	16
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	29
I. Sistematika Penulisan	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	34
A. Tujuan, Sasaran Kabupaten	34
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	34
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	36
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	48
a. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon II)	48
b. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi	52
c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan, Hambatan dan Langkah-Langkah Antisipasi yang Diambil	60
B. Akuntabilitas Keuangan	67
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024	67
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	70
3. Perbandingan Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023 dan 2024	75
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Strategi Peningkatan Kinerja	84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yaitu dalam mendukung Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut yaitu: **TANAH LAUT BERDAYA SAING** sebagaimana tertuang dalam RPD Tanah Laut Tahun 2024-2026 melalui pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai **Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**.

Di dalam RPJP memberikan arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informasi antara lain untuk meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media massa tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global, meningkatkan peran pers yang bebas, membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional, memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Dari arahan RPJP menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informasi antara lain adalah untuk mendorong pemberdayaan potensi masyarakat. Pemerintah punya tanggung jawab yang besar dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dan menciptakan keterbukaan informasi, kebebasan informasi dan kebebasan pers yang kondusif bagi pengembangan peran serta

masyarakat dalam era globalisasi informasi. Oleh karena itu secara konsisten, segenap komponen bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut perlu turut serta mendapatkan iklim yang kondusif untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian kebebasan di bidang informasi dan komunikasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024–2026, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi dan Informasi yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019

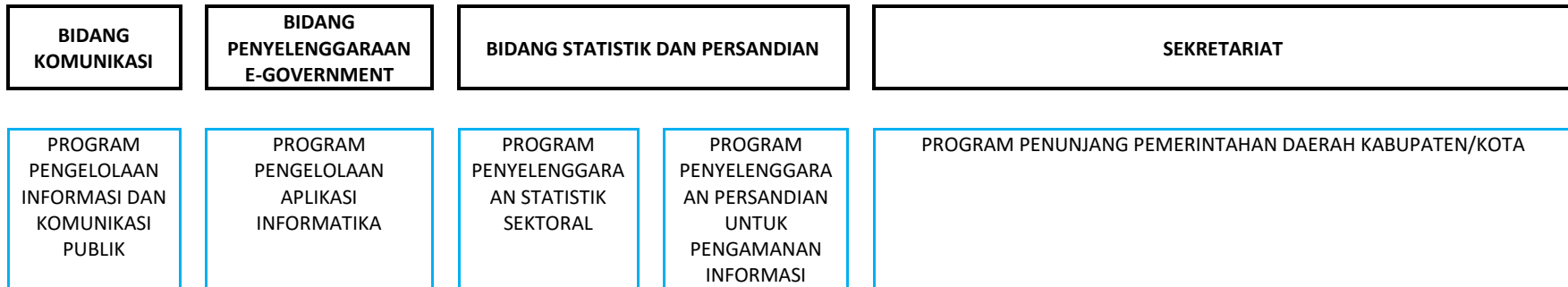
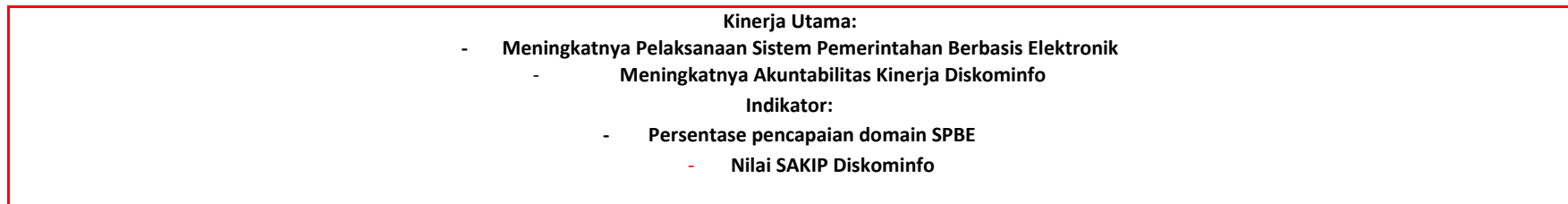
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.

D. Cascading Kinerja

Gambaran cascading kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut diperlihatkan pada bagan 1.1 di bawah ini :

Bagan 1.1 Cascading Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut



Meningkatnya penyebaran informasi publik di Kabupaten Tanah Laut

Meningkatnya pelayanan Aplikasi dan Informatika

Meningkatnya kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut

Meningkatnya penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi

Meningkatnya kualitas kinerja layanan Sekretariat Diskominfo

Indikator: Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik

Indikator: Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika

Indikator: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator: Tingkat Keamanan Informasi

Indikator:
1. Nilai komponen perencanaan
2. Nilai komponen pengukuran
3. Nilai komponen pelaporan
4. Nilai komponen evaluasi internal
5. Hasil survei pelayanan kesekretariatan

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang kemudian diperbaharui pada tahun 2021 melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

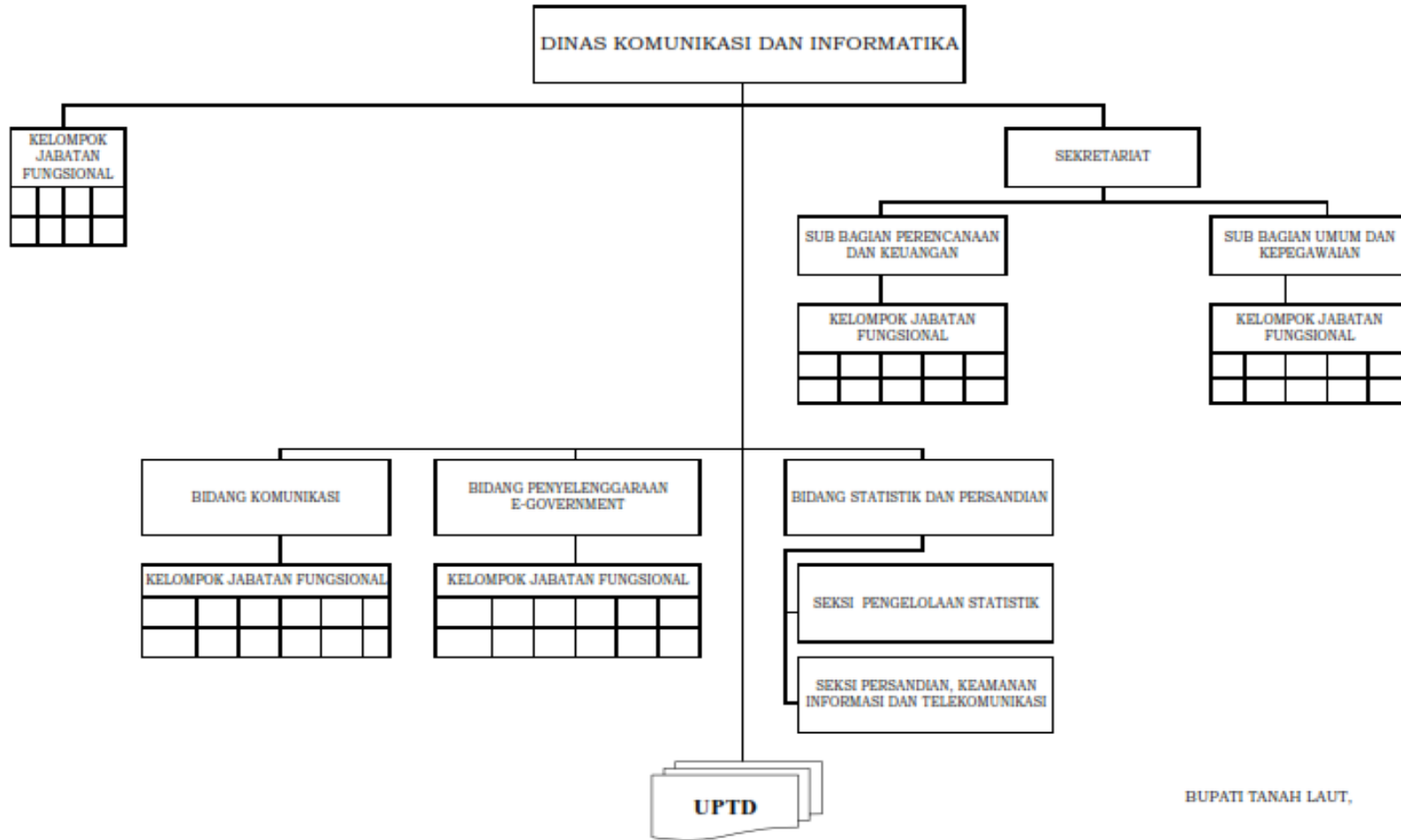
Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pembinaan UPT dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada bagan 1.2 beserta uraian tugas sebagai berikut :

Bagan 1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Komunikasi
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
 - 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
- f. Unit Pelaksana Teknis

Kepala Dinas

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPT Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bidang Komunikasi

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
 - b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;

- f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan E-Government

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan E-Government.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan E-Government;
 - b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan E-Government;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan E-Government;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan E-Government;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
 - f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang E-Government;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan E-Government;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian

(1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.

(2) Menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
- b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
- f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian membawahi dari:

- 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
- 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

Seksi Pengelolaan Statistik

- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik.

Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian.

F. Isu Strategis

Isu-isu strategis terkait pengembangan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan permasalahan, sebagai berikut:

1. Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut
3. Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut.
4. Pengelolaan persandian dan keamanan informasi.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 20 (dua puluh) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 20 orang tersebut, terdiri dari Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 2 orang dan 1 orang pelaksana tugas kepala bidang (Plt), Kepala Seksi (Pejabat Pangawas) sebanyak 4 orang, staf pelaksana/fungsional sebanyak 11 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi

kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretaris		1			1
3	Kepala Bidang		3			3
4	Kepala Seksi			4		4
5	Staf PNS				11	11
	JUMLAH	1	4	4	11	20

Golongan III menempati jumlah terbanyak di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebanyak 10 orang, diikuti golongan II sebanyak 4 orang, golongan IV sebanyak 4 orang, golongan IX sebanyak 2 orang, serta ditambah tenaga kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 20 (dua puluh) orang.

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris		1						1
3	Kepala Bidang		1	2					3
4	Kasubbag/Kasi			4					4
5	Staf		1	3	5	2			11
	JUMLAH	0	4	9	5	2	0	0	20

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 4 orang memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang 1 orang dan 1 orang pejabat fungsional. Yang memiliki pendidikan

S1/D4 sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 5 orang dan SLTA sebanyak 2 orang.

Terkait dengan LAPKIN, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 sudah mencukupi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun akan terus ditingkatkan guna peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel sarana dan prasarana umum sebagai berikut:

Tabel 1.3

Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG	KETERANGAN	TAHUN PENGADAAN
1	Portable Generating Set	1	Baik	Genset Radio Tuntung Pandang	2015
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	Baik	Mobil operasional Kepala Dinas dan mobil operasional Dinas dan mobil operasional Radio Tuntung Pandang FM	2019, 2014, 2014
3	Sepeda Motor	6	Cukup baik	Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas	2014

4	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	6	Baik	Berupa penangkal petir beserta perlengkapannya pendukungnya, tower jaringan ukuran sedang, plat besi/dak cor pelindung kabel	2015
5	Perkakas Standar Lain-lain	14	Baik	Harness, carabiner, tali karmantel, Bag Pack, mini katrol (pulley), figure 8	2015
6	Perkakas Khusus Lain-lain	38	Baik	Digital multimeter, LAN tester digital, bor baterai combo, harness/sabuk pengaman, Bag pack (tas peralatan), portabel iron solder, obeng set, tespen, obeng listrik, kunci inggris, kunci sock, kunci ring all pas size, Tang set, Kunci L Panjang, Crimping Tool RJ11/RJ45, pemotong kabel, Toolbox, helmet, Headlamp	2015
7	Lemari Besi	10	Baik	Lemari arsip	2017, 2024
8	Rak Besi/Metal	10	Baik	rackmount untuk penyimpan radio station, Rack Server 42/48 U, Rack Server 18/22 U, Rak besi arsip	2015
9	Filling Besi/Metal	4	Baik	Filling Kabinet Tingkat 4 (Empat)	2017
10	Brank Kas	1	Baik	-	2010
11	Kardek Besi/Metal	2	Baik	Locker 5 laci	2013
12	Papan Visual/Running Teks	4	Baik	running text, Runing text mobil Radio tuntung pandang, Neon box mobil radio tuntung pandang	2014, 2024

13	Papan Nama Instansi	1	Baik	-	2018
14	Papan Pengumuman	8	Baik	untuk pemberitahuan kawasan free wifi	2018
15	Mesin Absensi	93	Baik	Mesin Absensi untuk menunjang pelaksanaan kehadiran pegawai di SKPD	2019
16	Genset	2	Baik		2015
17	Mesin Pompa Air	1	Baik	-	2015
18	Papan Nama Ruang/Jabatan	12	Baik	-	2018
19	Papan Nama Lainnya	1	Baik	Papan nama Radio Tuntung Pandang	2014
20	Meja Kayu	10	Baik	meja kerja	2013
21	Meja Rapat	5	Baik	Meja rapat	2017, 2023
22	Meja Panjang	1	Baik	Meja Jati Panjang 3m + Kursi	2015
23	Bangku Tunggu	2	Baik	Bangku tunggu	2015
24	Kursi Lipat	31	Baik	Kursi lipat	2018, 2024
25	Meja Komputer	2	Baik	-	2018
26	Sofa	3	Baik	-	2016, 2024
27	Kursi Kerja	36	Baik	Kursi kerja eselon dan staf	2017
28	Meja Kerja	12	Baik	-	2017, 2024
29	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik	-	2015
30	AC Split	15	Baik	-	2017, 2019, 2023, 2024
31	Exhause Fan	1	Baik	-	2018
32	Televisi	2	Baik	untuk di Bidang E Government	2019
33	Microphone	1	Baik	Mikropon Siaran Warna Silver	2019
34	Microphone Table Stand	6	Baik	Mikropon meja berdiri	2019
35	Tandon Air	1	Baik	-	2018
36	Tabung Pemadam Api	2	Cukup baik	-	2019
37	Mainframe	3	Baik	Server data high end, server 16 GB Ram, 2 x 1 TB	2019
38	Personal Komputer Lain-lain	4	Baik	Management Routing, wire management,	2015

				Switch (Workgroup Switches, 48 10/100/1000, 2 T/SFP LAN), H/W Firewall	
39	P.C Unit/ Komputer PC	22	Baik	-	2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024
40	Laptop	25	Baik	-	2017, 2019, 2020, 2023, 2024
41	Personal Komputer Lain-lain	5	Baik	untuk pemetaan dan desain grafis, load balancing	2019
42	Hard Disk	4	Baik	Hardisk server	2019
43	Monitor	3	Baik	LCD Monitor	2019, 2023
44	Printer	21	Baik	-	2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024
45	UPS	7	Baik	UPS Rackmount non expandable, UPS/Stabilizer- Informasi, UPS 10.000 VA + Railing Kit + Battery Pack	2019
46	Stabilizer/Stavolt	5	Baik	Stabilizer / INFORMASI	2019, 2024
47	Harddisk Eksternal	4	Baik	meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual	2019
48	Memory	2	Baik	untuk meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual, SSD	2019
49	Router	67	Baik	PC Bridge, Router 16 Core CPU, Omni Router, Backup Router	2019
50	Modem	21	Baik	perlengkapan sms broadcast/gateway dan MODEM BID.EGOV TH 2018	2018

51	Peralatan Jaringan Lain-lain	6	Kurang Baik	perlengkapan sms broadcast/ gateway, jaringan FO feeder, perlengkapan, dan jasa instalasinya, jaringan intranet, perlengkapan, dan instalasinya, print server	2018
52	Tiang Antena	7	Baik	Tiang Hotspot	2018
53	Radio Access Point	37	Baik	Sollar cell Hotspot, Radio point multi, Radio Point to Point (Station receive dan wds) Radio Point to Point (Station receive dan wds) Radio point to point(station receive dan wds)	2018
54	Antena	5	Kurang baik	antena omni jaringan penunjang e-governm	2015
55	Switch Hub	23	Baik	-	2017
56	Wireless Access Point	8	Baik	Wireless Station 5 Ghz (outdoor)	2017, 2023
57	Anti Petir/Ground Jaringan	1	Baik	-	2019
58	Proyektor + Attachment	1	Baik	water wall & proyektor	2015
59	Telephone Hybird	1	Kurang Baik	IP Phone	2015
60	Headphone	20	Baik	-	2015, 2024
61	Microphone/Wireless Mic	10	Baik	-	2019, 2023, 2024
62	Professional Sound System	3	Kurang Baik	Sound Sistem	2016
63	Microphone Table stand	6	Kurang Baik	-	2016
64	Handycam	2	Baik	-	2019, 2024
65	Stand Microphone	5	Cukup Baik	-	2019
66	Televisi	2	Baik	-	2019, 2024
67	Camera Electronic	3	Baik	-	2019
68	Amplifier	1	Baik	Amplifier	2019
69	Loudspeaker	2	Baik	speaker	2019
70	Handy Talky	8	Baik	-	2019
71	Handphone	5	Baik	-	2019

72	Sound System	2	Baik	-	2019, 2024
73	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	2	Baik	-	2019
74	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	3	Cukup Baik	Tabung Pemancar Radio Tuntung Pandang FM dan Exiter Pemancar Radio	2019
75	Program Input Equipment Lain-lain	1	Baik	Exiter	2019
76	CCTV	1	Baik	TEKNOLOGI DIGITAL SECURITY DI TITIK RAWAN KAMTIBMAS	2018
77	CCTV	2	Baik	cctv 8 channel	2020, 2023
78	Tabung Pemadam Api	2	Baik	-	2020
79	Stand Microphone	5	Baik	-	2020
80	Meja Siaran	3	Baik	-	2020
81	Kursi Staf	26	Baik	-	2020, 2023
82	Air Conditioner 1 PK	4	Baik	-	2020
83	Air Conditioner 1,5 PK	1	Baik	-	2020
84	Kipas Angin	2	Baik	-	2020
85	Televisi LED TV 40 inch	1	Baik	-	2020
86	Scanner	3	Baik	-	2020, 2023
87	Meja Kerja	1	Baik	-	2020
88	Kursi Kerja	5	Baik	-	2020, 2024
89	Kursi Tamu	1	Baik	-	2020
90	Layar Proyektor 120"	1	Baik	-	2020
91	Layar Proyektor 96"	1	Baik	-	2023
92	Alat pengontrol temperatur/suhu ruangan	1	Baik	-	2020
93	Drone	1	Baik	-	2021
94	Kamera Video	4	Baik	-	2021
95	Video Capture	2	Baik	-	2021
96	Tangga Teleskopik	1	Baik	-	2021
97	Bracket TV up to 65 Inch	2	Baik	-	2021
98	Alat Pemadam Api Ringan Fireball	6	Baik	-	2021
99	Alat Pemadam Api Ringan Tabung	1	Baik	-	2021
100	UPS 30 Kva (include Modular Battery	1	Baik	-	2021

101	Cabinet, Battery String) MEMORY (RAM) 8 GB DDR4	1	Baik	-	2021
102	Hardisk eksternal 2 TB	1	Baik	-	2021
103	Perangka Jaringan Lainnya	1	Baik	Cloud Core Router, Access Point SKPD, Switch Hub, Splitter 1:4 Optical Distribution Point, Splitter 1:8 Optical Distribution Point, Optical Network Termination (ONT)	2021
104	Jaringan Fiber Optik Antar SKPD	1	Baik	-	2020
105	Rackmount	4	Baik	-	2020, 2023
106	FO Toolkit	1	Baik	-	2020
107	Perangkat Video Conference	2	Baik	-	2020
108	Perangkat Keamanan Ruang NOC	1	Baik	CCTV dan Alarm	2020
109	Panel listrik ruang NOC	1	Baik	-	2020
110	Aplikasi penunjang E-Government	10	Baik	-	2020, 2023
111	Komputer Tablet	1	Baik	-	2020
112	UPS 6000 VA	1	Baik	-	2020
113	Magnetic Switch 220 V	2	Baik	-	2020
114	Peralatan Studio Video dan Film	1	Baik	-	2020
115	Alat Komunikasi Radio VHF	1	Baik	-	2020
116	UPS Standar 1200 V	1	Baik	-	2023
117	Routerboard	1	Baik	-	2023
118	Artificial Plant	2	Baik	-	2023
119	Bracket Monitor Video Wall	16	Baik	-	2023
120	Interior Command Center	1	Baik	-	2023
121	Kursi Deret Ruang Peninjau	2	Bak	-	2023
122	Kursi Rapat	6	Baik	-	2023
123	Kursi VVIP	1	Baik	-	2023
124	Meja Kendali	1	Baik	-	2023
125	Meja Operator Melengkung	1	Baik	-	2023

126	Meja Pemantau CCTV	1	Baik	-	2023
127	Televisi LED TV 65 inch	2	Baik	-	2023
128	Apar Powder	1	Baik	-	2023
129	Ceiling Speaker	4	Baik	-	2023
130	Clip On microphone	1	Baik	-	2023
131	Meja Call Centre & Pengolahan Data uk 120x60	3	Baik	-	2023
132	Microphone Chairman unit	1	Baik	-	2023
133	Microphone delegate unit	4	Baik	-	2023
134	Video Processor Board Output HDMI 4 chanel	4	Baik	-	2023
135	Volume Control Ruangan	3	Baik	-	2023
136	HDMI Extender Reciever dan Sender	30	Baik	-	2023
137	HDMI Splitter	16	Baik	-	2023
138	Kabel HDMI	30	Baik	-	2023
139	Kabel UTP	16	Baik	-	2023
140	LCD/LED Video Wall Sektor Utama dan Sekunder	14	Baik	-	2023
141	Mobile Video Conference	1	Baik	-	2023
142	Sistem Audio (channel Audio Mixer)	2	Baik	-	2023, 2024
143	Video Controller 4U Chasis 11 Slot	1	Baik	-	2023
144	Video Processor Board Input HDMI 4 chanel	1	Baik	-	2023
145	UPS 10000 VA	1	Baik	-	2023
146	PC Unit Operator dan Pengendali Command Center	7	Baik	-	2023
147	Eksternal Webcam Operator Command Center	7	Baik	-	2023
148	Headset	7	Baik	-	2023
149	LED/LCD 22 inchi Touchscreen	3	Baik	-	2023
150	LED/LCD Monitor	13	Baik	-	2023
151	LCD Proyektor	1	Baik	-	2024
152	Dry Cabinet	1	Baik	-	2024
153	Pembagi output phone mixer	1	Baik	-	2024

154	Kamera Mirrorless	1	Baik	-	2024
155	Video Tron	1	Bak	-	2024
156	Gimbal/Stabilizer	1	Baik	-	2024

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut maka diperlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 2.942.225,-**
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.979.315,-
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 962.910,-
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 4.062.544.866,-**
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 4.058.545.453,-
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 3.999.413,-
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 30.000.000,-**
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 30.000.000,-
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 646.390.825,-**

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 7.594.083,-
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 194.064.669,-
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 9.999.933,-
 - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. Rp14.999.622,-
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp 5.400.000,-
 - f) Penyediaan Bahan / Material sebesar Rp. 15.000.000,-
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 399.095.000,-
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 170.001.949,-**
- a) Pengadaan Mebel sebesar Rp 49.979.442,-
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp 29.557.507,-
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp 90.465.000,-
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 1.483.240.076,-**
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 253.000.000,-
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 1.230.240.076,-
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 137.715.800,-**
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 33.300.000,-

- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan sebesar Rp. 62.815.800,-
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 19.600.000,-
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 22.000.000,-

II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

8. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.213.954.566,-

- a) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik sebesar Rp. 21.996.500,-
- b) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 50.000.000,-
- c) Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 2.188.320.000,-
- d) Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 351.550.000,-
- e) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas sebesar Rp. 29.981.828,-
- f) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotasebesar Rp. 1.572.106.238,-

III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

9. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 3.901.586.388,-

- a) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.901.586.388,-

10. Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 104.400.000,-

- a) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar Rp. 104.400.000,-

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

11. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 88.484.570,-

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebesar Rp. 19.584.570,-
- b) Membangun Metadata Statistik Sektoral sebesar Rp. 28.400.000,-
- c) Pengembangan Infrastruktur sebesar Rp. 40.500.000,-

V. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

12. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 209.364.424,-

- a) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 42.636.786,-
- b) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 166.727.638,-

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mendapatkan beberapa catatan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan menjadi perbaikan SAKIP ke depannya yang dirangkum dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Tindak lanjut atas LHE SAKIP SKPD Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status/Progress Penyelesaian	Keterangan
I.	Perencanaan Kinerja			
1	Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan.	Penyusunan perencanaan kinerja akan mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan	Penyusunan kinerja telah dilaksanakan pada bulan Januari 2024	2 kali
	Agar dokumen perencanaan yaitu dokumen Renja dan PK dapat dipublikasikan tepat waktu	Dokumen perencanaan yaitu dokumen Renja dan PK akan dipublikasikan dengan tepat waktu	Dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan pada bulan Januari 2024	1 kegiatan
II.	Pengukuran Kinerja			
1	Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya	Pelaksanaan perubahan Renja akan memperhatikan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya	- Pelaksanaan perubahan anggaran akan dilaksanakan pada bulan September s.d Oktober 2024 - Pelaksanaan monev per triwulan telah dilaksanakan melalui aplikasi emonev di tahun berjalan	1 kali
2	Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang diperjanjikan (PK) namun pada SKP feedback pimpinan terhadap hasil capaian kinerja belum menyajikan umpan balik yang berkelanjutan	Pada SKP feedback pimpinan akan disajikan umpan balik yang berkelanjutan terhadap capaian kinerja	Feedback SKP akan diisi pada penilaian kinerja tahun selanjutnya	1 kali

3	Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dalam indikator pencapaian target kinerja agar dapat dikoordinasikan dan dipenuhi	Melakukan koordinasi untuk memenuhi pencapaian target kinerja dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja tersebut	Telah dilakukan koordinasi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian-pencapaian indikator sebanyak 2 kali	4 kali
III	Pelaporan Kinerja			
1	Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, dan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Laporan kinerja berkala (monev per triwulan) yang disusun akan digunakan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, dan perencanaan kinerja	Laporan kinerja berkala (monev per triwulan) telah dilaksanakan melalui aplikasi emonev	4 kali
IV	Evaluasi Kinerja			
1	Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan evaluasi internal tahun 2023 dengan Menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan tahun 2024 kepada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut akan segera menindaklanjuti rekomendasi laporan evaluasi internal tahun 2023 dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan tahun 2024	Tindak lanjut rekomendasi dan rencana aksi telah disusun dan dilaksanakan di tahun 2024	1 kegiatan

I. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2024 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Tujuan, Sasaran Kabupaten
- B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 1. Sasaran RPJMD
 2. Eselon II (Kepala Dinas)
- B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

A. Tujuan, Sasaran Kabupaten

Tujuan Kabupaten Tanah Laut yaitu :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”

Sasaran Kabupaten :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang

dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Formulir Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pencapaian domain SPBE	64%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	82 nilai

Berikut diperlihatkan tabel tujuan, indikator, target, sasaran, indikator dan target 3 Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 2.2 Tujuan, sasaran, indikator, target 3 tahun Sesuai Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengelolaan Sistem		Indeks SPBE	3,2 nilai	3,4 nilai	3,6 nilai

	Pemerintahan Berbasis Elektronik					
		Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pencapaian domain SPBE	64%	68%	72%
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	70,01 nilai	75 nilai	80,01 nilai
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	81 nilai	82 nilai	84 nilai

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran strategis adalah seperti tabel berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Renstra		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Persentase pencapaian domain SPBE	Hasil Penilaian SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Dinas Kominfo
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Pencapaian Kinerja (20%)	Dinas Kominfo

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 yang telah disepakati baik oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut:

**Perjanjian/Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2024
(Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut)**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Persentase pencapaian domain SPBE	64%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	2. Nilai AKIP Diskominfo	81 nilai

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.532.835.741,-
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	4.213.954.566,-
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	4.005.986.388,-
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	88.484.570,-
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	209.364.424,-
Jumlah		Rp	15.050.625.689,-

Perjanjian/Penetapan Kinerja Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas kinerja layanan Sekretariat Diskominfo	1. Nilai komponen perencanaan	24 nilai
		2. Nilai komponen pengukuran	24 nilai
		3. Nilai komponen pengukuran	12 nilai
		4. Nilai komponen evaluasi internal	20 nilai

		5. Hasil survei pelayanan kesekretariatan	84 nilai
--	--	---	----------

Program			Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Daerah	Rp	6.532.835.741,-
Jumlah			Rp	6.532.835.741,-

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	1. Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik	100 %
		1. Tingkat tindak lanjut pengaduan minimal 1 hari	1 nilai
		2. Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai SOP	100 %
		3. Jumlah informasi Pembangunan daerah yang tersebarluaskan	750 buah
		4. Persentase media komunikasi publik yang dikelola dengan baik dan terbarukan	100 %
		5. Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai SOP	100 %
		6. Persentase KIM yang aktif	80 %
		7. Persentase Sarpras dalam kondisi baik sesuai standar	100 %

Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pembinaan SDM pengelola SP4N LAPOR	1. Jumlah SDM pengelola SP4N LAPOR yang dibina	25 Orang
2	Meningkatnya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1. Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	12 Dokumen
3	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan	12 Dokumen

	Perencanaan Media Komunikasi Publik	Perencanaan Media Komunikasi Publik	
4	Terlaksananya peliputan kegiatan pembangunan daerah	1. Jumlah laporan hasil peliputan pembangunan daerah	12 laporan
5	Terlaksananya pengelolaan radio pemerintah daerah dan media lainnya	1. Jumlah radio pemerintah daerah yang dikelola	1 buah
		2. Jumlah media lainnya yang dikelola	6 buah
6	Terlaksananya monitoring dan evaluasi media Komunikasi publik	1. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	12 dokumen
7	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Perangkat Daerah Pengelola informasi dokumentasi	1. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat	1 orang
8	Terlaksananya pemeliharaan aplikasi pengelolaan informasi	1. Jumlah aplikasi pengelolaan informasi yang dipelihara	2 buah
		2. Jumlah SDM pengelola aplikasi yang bersertifikat	1 orang
9	Terlaksananya kompetisi KIM tingkat Kabupaten	1. Jumlah KIM yang mengikuti kompetisi	3 kelompok
10	Terlaksananya pembinaan SDM KIM	1. Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	4 kali
11	Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1. Jumlah prasarana dan sarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang tersedia	2 unit
12	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1. Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang terpelihara	2 unit

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	4.213.954.566,-
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	21.996.500,-
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	50.000.000,-
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.188.320.000,-
		Pelayanan Informasi Publik	351.550.000,-

			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	29.981.828,-
			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1.572.106.238,-
			Jumlah	4.213.954.566,-

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Penyelenggaraan
E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan Aplikasi dan Informatika	1. Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	80 %
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur dan jaringan intra pemerintah	1. Persentase SKPD yang terlayani jaringan intra pemerintah	77,5 %
	Meningkatnya pengelolaan layanan <i>e-government</i> di lingkup pemerintah	2. Persentase SKPD yang mendapat layanan <i>e-government</i>	100 %

Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengelolaan jaringan intra pemerintah	1. Jumlah jaringan intra pemerintah yang dikelola	1 unit
2	Terlaksananya pengelolaan <i>Network Operation Center (NOC)</i>	1. Jumlah server dan perangkat jaringan yang berfungsi dengan baik	4 unit
3	Terlaksananya pengelolaan aplikasi pemerintah daerah	1. Jumlah aplikasi yang terkelola dengan baik	27 buah
4	Terkelolanya domain Kabupaten	1. Jumlah sub domain yang dikelola	40 buah

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.930.057.462,-

		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.930.057.462,-
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	104.400.000,-
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	104.400.000,-
		Jumlah	4.034.457.462,-

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun
2024**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	1. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.8 nilai
	Meningkatnya produsen data	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar data statistik	72 %
	Meningkatnya kualitas data statistik	1. Persentase data akurat dan sesuai standar	85 %
2.	Meningkatnya penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi	1. Tingkat Keamanan Informasi	450 nilai
	Meningkatnya penerapan TTE di lingkungan Pemerintah Daerah	1. Persentase PD yang menerapkan TTE	50 %
	Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah	1. Persentase gangguan keamanan yg terselesaikan	100 %

Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pemeriksaan data statistik sektoral oleh produsen data	1. Jumlah produsen data yang melaksanakan pemeriksaan data	29 PD
		2. Jumlah SDM yang bersertifikat	3 orang
2	Terlaksananya analisis data statistik sektoral	1. Jumlah laporan analisis data	2 laporan
		2. Jumlah data yang diperiksa	1216 data
3	Terlaksananya pengembangan infrastruktur statistik sektoral	1. Jumlah infrastruktur statistik sektoral yang dikembangkan	2 Unit
4	Terlaksananya fasilitasi pendaftaran TTE	1. Jumlah Sertifikat Elektronik TTE yang diterbitkan	4 buah

		2. Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi TTE	1 laporan
		3. Jumlah laporan hasil evaluasi	2 unit
5	Terlaksananya evaluasi mandiri keamanan Informasi	1. Jumlah perangkat keamanan Informasi yang tersedia	1 unit
		2. Jumlah SDM yang bersertifikat	1 orang
		3. Jumlah laporan hasil evaluasi	1 laporan

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	88.484.570,-
		Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19.584.570,-
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	28.400.000,-
		Pengembangan Infrastruktur	,-
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	209.364.424,-
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.636.786,-
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	166.727.638,-
Jumlah			297.848.994,-

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
		1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	5 Orang

		Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
		1. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
		2. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket
		3. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket
		4. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket
		5. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 dokumen
		6. Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket
		7. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan
		8. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 dokumen
3.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
		1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 unit
		2. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit
		3. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
4.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan

		2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
5.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit
		2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit
		3. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 unit
		4. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	646.390.825,-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.594.083,-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.064.669,-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.933,-
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	14.999.622,-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,-
		Penyediaan/Bahan Material	15.000.000,-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.095.000,-
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	237.518,-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.001.949,-
		Pengadaan Mebel	49.979.442,-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.557.507,-		

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.465.000,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.483.240.076,-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.000.000,-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.230.240.076,-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.715.800,-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.300.000,-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	62.815.800,-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.600.000,-
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000,-
		Jumlah	2.467.348.650,-

Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
		1. Jumlah laporan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	7 dokumen
		2. Jumlah laporan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	5 dokumen
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
		1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang/bulan
		2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	5 dokumen

			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
--	--	--	---------------------------------------	--

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.942.225,-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.976.315,-
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.062.544.866,-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.058.545.453,-
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah			4.065.484.091,-

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut memiliki instrument pendukung capaian kinerja diantaranya:

1. Jaringan Intra antar SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
2. Akses Internet terpadu Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
3. Ruang *Network Operation Center* (NOC);
4. Gedung Command Center Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
5. Akses komunikasi dengan 1 unit tower pemancar radio dan jaringan;
6. Portal Website Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
8. Studio LPPL Radio Tuntung Pandang Tanah Laut;
9. Website layanan Informasi dan Data Tanah Laut.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan mekanisme prosedur pelayanan, di antaranya :

- a. Penyiaran iklan layanan masyarakat
- b. Peliputan dan penyiaran
- c. Pemberian rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi
- d. Pengendalian hak akses data
- e. Pemeliharaan dan akses data center
- f. Layanan lapor.go.id Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- g. Manajemen dan akses data jaringan (*network*)
- h. Pembuatan domain *website* resmi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Desa dan organisasi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- i. *Co-Location* / Penempatan server dan hosting aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- j. *Back-up* dan *restore database server* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- k. *Update website*
- l. Layanan data sektoral
- m. Tata kelola berita sandi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target sasaran strategis RPD dan perjanjian kinerja tahun 2024. Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut diukur dengan membandingkan realisasi capaian kinerja terhadap target untuk setiap indikator sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana hasil proses penyalarsan cascading kinerja oleh Tim Sakip. Regulasi kinerja dilakukan pada setiap pimpinan, mulai dari Eselon II (Kepala), Eselon III (Sekertaris dan Kepala Bidang) dan Eselon IV (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi).

Dalam penyusunan penilaian kinerja, perhitungannya persentase pencapaian secara umum, menggunakan rumus pembilang (target) dibagi dengan penyebut (realisasi) dikali 100%.

a. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon II)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra yang telah dibuat untuk tahun 2024-2026 telah menetapkan beberapa sasaran strategis. LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk tahun anggaran 2024 adalah Laporan Kinerja Dinas yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan keadaan, Renstra dibuat untuk setiap sasaran dapat lebih dari satu indikator kinerja sasaran dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan indikator kinerja yang akan

dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 sesuai sasaran strategis yang akan diketahui keberadaannya.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan kategori pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengelompokan Capaian Kinerja

Nilai Persepsi	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	25 – 43,75	Tidak Baik
II	43,76 – 62,50	Kurang Baik
III	62,51 – 81,25	Baik
IV	81,26 – 100	Sangat Baik

Berikut diperlihatkan tabel realisasi capaian Sasaran Strategis

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN 2024			KET
						Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pencapaian domain SPBE	55	62,2	62,4	64	62,4	97,5 %	Kategori Baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	77,85 nilai	76,8 nilai	78,05 nilai	81 nilai	82,1 nilai	101,36 %	Kategori A
	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN							99,43 %	Kategori Sangat Baik

Sumber : Diskominfo Kab. Tanah Laut

Hasil perhitungan persentase rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 adalah **99,43 %** dengan kategori capaian **Sangat Baik**. Meskipun demikian, capaian yang diperoleh pada tahun ini mendapat kategori sangat memuaskan namun harus tetap selalu dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) terdiri dari 2 (dua) kinerja utama, yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator kinerja utama persentase pencapaian domain SPBE; dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator kinerja utama Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pencapaian domain SPBE	64	62,4	97,5
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	81	82,1	101,36
Rata-rata capaian kinerja					99,43

b. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi

- Analisis Capaian Kinerja

1) IKU Persentase Pencapaian Domain SPBE

Berdasarkan tabel 3.3 mengenai target Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, maka dapat dibuat tabel 3.4 mengenai Capaian Indikator Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, 2023 dan 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		2023		2024		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pencapaian domain SPBE	55	62,2	63	62,4	64	62,4	Indeks

Sumber : DiskominfoStasan Kab. Tanah Laut

Hasil Evaluasi SPBE tahun 2024

SPBE	3,12
Domain Kebijakan SPBE	: 3,10
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 3,10
Domain Tata Kelola SPBE	: 3,10
Perencanaan Strategis SPBE	: 2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 3,25
Penyelenggara SPBE	: 3,50
Domain Manajemen SPBE	: 1,09
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,13
Audit TIK	: 1,00
Domain Layanan SPBE	: 3,87

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik : 3,90
 Layanan Publik Berbasis Elektronik : 3,83

Rekap Tingkat Kematangan

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1

24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, diperoleh nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan indeks 3,12 (kategori Baik) sehingga diperoleh

persentase pencapaian domain SPBE sebesar 62,4% dari target capaian 64%. Dalam hal ini terlihat realisasi yang ada masih belum mencapai target realisasi namun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih memperoleh predikat baik. Perolehan nilai tersebut jika dibandingkan dengan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berada di urutan kesembilan dari seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berada pada urutan kesembilan, namun masih mampu mempertahankan perolehan indeks SPBE pada tahun 2024 yakni sebesar 3,12 dengan persentase pencapaian domain 62,4% dengan kategori baik, yang pada tahun 2023 juga memperoleh nilai yang sama yakni nilai 3,12 atau dengan persentase pencapaian domain 62,4%.

Tabel 3.7 Tabel Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan Tahun 2024

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	3,63	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Banjar	2,87	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,12	Baik
4	Pemerintah Kab. Tapin	3,81	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	4,09	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	3,37	Baik
7	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,99	Baik
8	Pemerintah Kab. Tabalong	3,70	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,43	Cukup
10	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	2,51	Cukup
11	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,30	Baik
12	Pemerintah Kab. Balangan	3,34	Baik
13	Pemerintah Kota Banjarmasin	4,06	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,74	Baik

Sumber : Kepmenpan RB Nomor 663 Tahun 2024

- Perbandingan Realisasi dengan Target

Dasar hukum SPBE adalah Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan suatu sistem untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

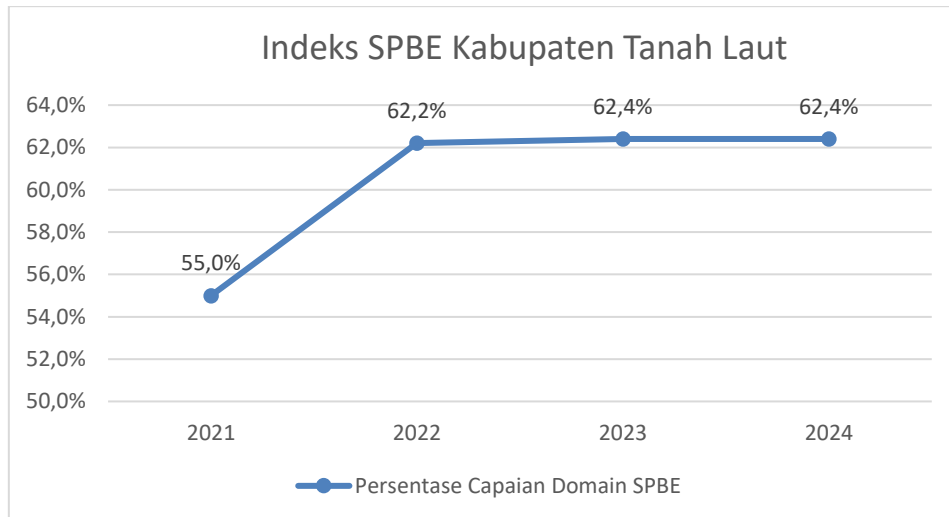
Pencapaian domain SPBE diperoleh dari hasil evaluasi SPBE Tahun 2024 yang dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dikoordinatori oleh Bidang Penyelenggaraan E-Government, yang pelaksanaannya dianggarkan melalui program pengelolaan aplikasi informatika; kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. Seluruh SKPD dan stakeholder terkait dilibatkan dalam upaya peningkatan capaian domain SPBE di tahun 2024.

Perolehan capaian domain SPBE tahun 2024 adalah sebesar 62,4% yang berarti capaian ini mendekati nilai target yang

ditetapkan yakni sebesar 64%, dengan persentase realisasi mencapai 97,5%.

Tabel Kategori SPBE



Sumber : DiskominfoStasan Kab. Tanah Laut

Indeks SPBE tahun 2024 adalah 3,12 sehingga diperoleh persentase capaian domain sebesar 62,4%, hasil yang sama dengan capaian domain SPBE tahun 2023 yakni 62,4%, sedang tahun 2022 dengan persentase capaian 62,2%, sedangkan pada tahun 2021 dengan persentase capaian 55%, artinya pencapaian domain SPBE telah mengalami peningkatan atau semakin baik per tahunnya walaupun kecil. Pada tahun 2022 capaian domain SPBE kembali naik dari tahun sebelumnya (tahun 2021) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan nilai namun masih dalam kategori baik, penurunan nilai tersebut disebabkan adanya penambahan indikator penilaian domain SPBE dari 35 indikator menjadi 47 indikator penilaian. Persentase capaian domain SPBE yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 62,4% ini jika dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan pada sasaran strategis SKPD yakni sebesar 64% maka nilai yang diperoleh masih belum mencapai target dengan capaian dalam persen sebesar 97,5%, yang artinya nilai yang diperoleh belum

mencapai target sasaran dan akan lebih ditingkatkan lagi untuk penilaian domain SPBE di tahun ke depannya.

Hasil perolehan persentase capaian domain SPBE tahun 2024 sebesar 62,4% jika dibandingkan dengan capaian domain SPBE nasional tahun 2024 yakni sebesar 62,4%, maka capaian persentase capaian domain SPBE Kabupaten Tanah Laut telah sama dengan persentase capaian domain SPBE nasional.

Dari evaluasi penilaian domain SPBE ini, seluruh pimpinan dan penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik diinstruksikan agar meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

2) IKU Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja pada IKU Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		2023		2024		%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun 2024
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	81 nilai	76,8 nilai	82 nilai	78,05 nilai	81 nilai	82,1 nilai	101,3 %

Sumber : DiskominfoStasan Kab. Tanah Laut

- Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada indikator kinerja utama Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 telah terealisasi dengan nilai 82,1 dari target tahun 2024 dengan nilai 81 dengan persentase capaian 101,3%, artinya capaian telah melebihi dari target yang telah ditentukan, hal ini merupakan upaya perbaikan atau tindaklanjut atas catatan rekomendasi dari SAKIP tahun lalu yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yakni 84 maka masih kurang 1,9 yang artinya proses pelaksanaan SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut masih harus ditingkatkan kembali untuk ke depannya.

Dari pencapaian kinerja ini telah diperoleh tren positif atas perubahan budaya kinerja organisasi di mana seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah berkomitmen dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang baik. Tren positif budaya kinerja yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2024 diantaranya:

1. Capaian kinerja per indikator yang meningkat setiap tahunnya;
2. Penilaian capaian kinerja organisasi pada dokumen evaluasi kinerja pegawai dengan predikat baik.

Perbandingan target tahun 2024 pada indikator nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika telah terealisasi dengan nilai 82,1 dari target nilai 81 sehingga persentasenya adalah 101,3%. Jika dibandingkan capaian pada tahun 2024 dengan perolehan nilai SAKIP pada tahun 2023 yakni 78,05 maka ada kenaikan nilai 4,05.

c. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Hambatan dan Langkah-Langkah Antisipasi yang diambil

- IKU Persentase Capaian Domain SPBE

Persentase capaian domain SPBE Tahun 2024 dengan nilai 62,4% bila dibandingkan dengan persentase capaian domain SPBE Tahun 2023 dengan nilai 62,4% maka masih memperoleh nilai yang sama atau belum ada kenaikan. Meskipun belum ada kenaikan nilai, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengupayakan untuk mempertahankan nilai capaian domain SPBE yang diperoleh tahun sebelumnya dan menambah pemenuhan beberapa indikator penilaian, namun demikian meskipun dengan perolehan nilai 62,4%, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih memperoleh predikat baik yang merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi seluruh unit-unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan SPBE. Berbagai upaya yang dilakukan dengan membentuk Tim Evaluasi Internal Penilaian Mandiri SPBE di Kabupaten Tanah Laut, menyusun aktualisasi pelaksanaan SPBE, menentukan target indikator untuk dipenuhi, menyusun rencana aksi dan tindak lanjut sosialisasi, melakukan kegiatan teknis penunjang SPBE seperti integrasi berbagai aplikasi, penyediaan/fasilitasi sarana/prasarana komunikasi dan informasi, peningkatan layanan publik, peningkatan SDM aparatur, serta pemantapan dalam pelaksanaan Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Hal yang paling penting dalam upaya pencapaian target dan peningkatan domain SPBE adalah komitmen pimpinan/kepala daerah yang sangat tinggi, sehingga memacu SKPD lain untuk lebih serius dan aktif mengimplementasikan SPBE. Akhirnya koordinasi dan kerja sama dapat terjalin dengan baik antar SKPD.

Selanjutnya untuk dapat lebih meningkatkan capaian domain SPBE di tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu

menyusun rencana tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut, yaitu :

- Pada aspek kebijakan SPBE, Pemkab Tanah Laut perlu menyusun kebijakan internal yang komprehensif terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, sistem penghubung layanan, dan Tim Koordinasi SPBE.
- Pada aspek perencanaan strategis SPBE, Pemkab Tanah Laut perlu melengkapi dan memenuhi ketentuan nasional beberapa dokumen yang berkaitan dengan perencanaan strategis SPBE meliputi dokumen arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, inovasi proses bisnis.
- Pada aspek penyelenggara SPBE, Tim Koordinasi SPBE perlu menyusun program kerja dan melaksanakannya sesuai program kerja tersebut. Tim Kolaborasi SPBE yang dibentuk perlu melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- Pada aspek manajemen SPBE, Pemkab Tanah Laut perlu menyusun peta rencana dan pedoman pelaksanaan manajemen termasuk melaksanakan manajemen SPBE yang terdiri dari manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen layanan.
- Peningkatan kompetensi SDM TIK perlu dilaksanakan dengan mengacu pada kompetensi dalam bidang arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur keamanan dan arsitektur layanan.
- Pada kegiatan manajemen pengetahuan sudah diterapkan akan tetapi rencana kerja belum dicantumkan dalam bentuk peta rencana yang lengkap.
- Pada aspek audit TIK, Pemkab Tanah Laut perlu menyusun peta rencana, pedoman dan melaksanakan audit TIK yang terdiri dari audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan.

Diharapkan dengan melaksanakan seluruh evaluasi diatas, pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Kendala yang ada muncul dalam pencapaian indikator persentase capaian domain SPBE tahun 2024, diantaranya:

- Pada aspek kebijakan SPBE, Pemkab Tanah Laut belum menyusun kebijakan internal yang komprehensif terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, sistem penghubung layanan, dan Tim Koordinasi SPBE.
- Pada aspek perencanaan strategis SPBE, Pemkab Tanah Laut belum melengkapi dan memenuhi ketentuan nasional beberapa dokumen yang berkaitan dengan perencanaan strategis SPBE meliputi dokumen arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, inovasi proses bisnis.
- Pada aspek penyelenggara SPBE, Tim Koordinasi SPBE belum menyusun program kerja dan melaksanakannya sesuai program kerja tersebut. Tim Kolaborasi SPBE yang dibentuk belum melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- Pada aspek manajemen SPBE, Pemkab Tanah Laut belum menyusun peta rencana dan pedoman pelaksanaan manajemen termasuk melaksanakan manajemen SPBE yang terdiri dari manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen layanan.
- Peningkatan kompetensi SDM TIK belum mengacu pada kompetensi dalam bidang arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur keamanan dan arsitektur layanan.
- Pada kegiatan manajemen pengetahuan sudah diterapkan akan tetapi rencana kerja belum dicantumkan dalam bentuk peta rencana yang lengkap.

- Pada aspek audit TIK, Pemkab Tanah Laut belum menyusun peta reta rencana, pedoman dan melaksanakan audit TIK yang terdiri dari audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan.

Langkah-langkah atau upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Pada aspek kebijakan SPBE, Pemkab Tanah Laut akan menyusun kebijakan internal yang komprehensif terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, sistem penghubung layanan, dan Tim Koordinasi SPBE.
- Pada aspek perencanaan strategis SPBE, Pemkab Tanah Laut akan melengkapi dan memenuhi ketentuan nasional beberapa dokumen yang berkaitan dengan perencanaan strategis SPBE meliputi dokumen arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, inovasi proses bisnis sesuai dengan Rencana kerja pemerintah daerah.
- Pada aspek penyelenggara SPBE, Tim Koordinasi SPBE akan menyusun program kerja dan melaksanakannya sesuai program kerja tersebut. Tim Kolaborasi SPBE yang dibentuk akan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- Pada aspek manajemen SPBE, Pemkab Tanah Laut akan mengupayakan penyusunan peta rencana dan pedoman pelaksanaan manajemen termasuk melaksanakan manajemen SPBE yang terdiri dari manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen layanan.
- Peningkatan kompetensi SDM TIK akan dilaksanakan dengan mengacu pada kompetensi dalam bidang arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur keamanan dan arsitektur layanan.

- Pada kegiatan manajemen pengetahuan sudah diterapkan sesuai rencana kerja dan dicantumkan dalam bentuk peta rencana yang lengkap.
- Pada aspek audit TIK, Pemkab Tanah Laut akan menyusun peta reta rencana, pedoman dan melaksanakan audit TIK yang terdiri dari audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan.

- **IKU Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika**

Hasil capaian indikator nilai SAKIP diukur oleh Tim Evaluator Nilai SAKIP SKPD tahun 2024 yang merupakan evaluasi kinerja di tahun 2023. Hasil evaluasi dari Tim evaluasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah diperoleh nilai 82,1 (kategori A) dari target nilai yang ada 81 dengan persentase capaian 101,3%. Dilihat dari perbandingan tahun sebelumnya ada peningkatan nilai yakni sebesar 4,05. Hal ini menunjukkan SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sudah cukup baik namun masih tetap harus dilakukan perbaikan-perbaikan kedepannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai sebesar 82,1 dengan kategori A (memuaskan), akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja

Diperoleh nilai sebesar 26,10 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori A (memuaskan).

b. Pengukuran kinerja

Diperoleh nilai sebesar 24 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori BB (sangat baik).

c. Pelaporan kinerja

Diperoleh nilai sebesar 12 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 15%) dengan kategori BB (sangat baik).

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Diperoleh nilai sebesar 20 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 25%) dengan kategori BB (sangat baik).

Dari hasil evaluasi direkomendasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

1. Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan;
2. Agar dokumen perencanaan yaitu dokumen Renja dan PK dapat dipublikasikan tepat waktu.

b. Pengukuran Kinerja

1. Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya;
2. Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang diperjanjikan (PK) namun pada SKP feedback pimpinan terhadap hasil capaian kinerja belum menyajikan umpan balik yang berkelanjutan;
3. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dalam indikator pencapaian target kinerja agar dapat dikoordinasikan dan dipenuhi.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja berkala (monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, dan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023 dengan Menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan tahun 2024 kepada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika, di antaranya:

1. Masih banyaknya pegawai yang belum sepenuhnya berkomitmen dalam mengedepankan akuntabilitas kinerja dalam bekerja.
2. Adanya keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntabilitas kinerja.
3. Kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh pegawai pemerintah.
4. Sistem SAKIP masih belum terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- i. menyusun dan mendorong penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas kinerja;
- ii. melakukan pelatihan atau bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi pegawai terhadap penerapan SAKIP;
- iii. melakukan sosialisasi internal terhadap penerapan SAKIP;
- iv. Melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas implementasi sistem SAKIP melalui sistem yang terintegrasi.

Pencapaian kinerja utama pada jabatan struktural dalam mendukung tercapainya indikator kinerja utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yaitu digambarkan pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Tabel Pencapaian Kinerja Utama Jabatan Struktural

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas kinerja layanan Sekretariat Diskominfo	1. Nilai komponen perencanaan	24 nilai	26,10 nilai	108,75%
		2. Nilai komponen pengukuran	24 nilai	24 nilai	100%
		3. Nilai komponen pengukuran	12 nilai	12 nilai	100%
		4. Nilai komponen evaluasi internal	20 nilai	20 nilai	100%
		5. Hasil survei pelayanan kesekretariatan	84 nilai	87,5 nilai	104,17%
2.	Meningkatnya penyebaran informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik	100%	73%	101,36%
3	Meningkatnya pelayanan Aplikasi dan Informatika	Persentase layanan Aplikasi dan Informatika	80%	100%	125%
4	Meningkatnya kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,8 nilai	2,25 nilai	125%
5	Meningkatnya penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi	450 nilai	469 nilai	104,2%

6	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
8	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
9	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
10	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
12	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024

Ringkasan Realisasi APBD SKPD 2023 dan 2024

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Realisasi			%	Realisasi			%	Peningkatan /Penurunan (%)
		Pagu Tahun 2023	Pagu APBD-P Tahun 2023	Tahun 2023		Pagu Tahun 2024	Pagu APBD-P Tahun 2024	Tahun 2024		
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		
1	2	4		4	5					
1	PENDAPATAN DAERAH	562.424.000	562.424.000	571.265.600	101,33	-	-	-	-	-
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	562.424.000	562.424.000	571.265.600	101,33	-	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	562.424.000	562.424.000	571.265.600	101,33	-	-	-	-	-
2.	BELANJA DAERAH	14.298.548.208	15.282.604.284	13.845.191.241	90,59	14.593.477.772	15.050.625.689	13.690.453.242	90,96	0,37
2.1	BELANJA OPERASI	10.928.319.168	11.758.965.841	10.646.943.427	90,54	11.820.185.292	12.128.280.092	10.903.540.717	89,90	-0,64
	- Belanja Pegawai	3.836.888.971	3.836.888.971	3.229.887.314	84,18	4.058.545.453	4.058.545.453	3.294.111.538	81,16	-3,02
	- Belanja Barang dan Jasa	7.091.430.197	7.922.076.870	7.417.056.113	93,63	7.761.639.839	8.069.734.639	7.609.429.179	94,30	0,67
2.2	BELANJ MODAL	3.370.229.040	3.523.638.443	3.198.247.814	90,77	2.773.292.480	2.922.345.597	2.786.912.525	95,37	4,60

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.701.497.725	2.838.870.756	2.570.263.314	90,54	2.551.836.572	2.651.253.325	2.534.008.125	95,58	5,04
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.181.810	24.218.182	23.231.000	95,92	121.555.908	171.192.272	167.404.400	97,79	1,87
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	165.500.000	165.500.000	129.840.000	78,45	0	0	0	0	-78,45
- Belanja Modal Aset Lainnya	495.049.505	495.049.505	474.913.500	95,93	99.900.000	99.900.000	85.500.000	85,59	-10,34
Jumlah	14.298.548.208	15.282.604.284	13.845.191.241	90,59	14.593.477.772	15.050.625.689	13.690.453.242	90,96	0,37

Sumber : SIPD Tahun 2024

Gambaran tabel 3.38 tersebut di atas menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah pada tahun 2024 telah dihapuskan karena telah dipindahkan menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga tidak ada lagi pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2024. Pada pos belanja tahun ini realisasi penyerapan dananya sebesar Rp. 13.690.453.242,- (90,96%), ada kenaikan sebesar 0,37 % dari belanja tahun 2023 sebesar Rp. 13.845.191.241,- (90,59%), hal ini menunjukkan ada kenaikan nilai realisasi keuangan dengan pencapaian kinerja fisik telah terlaksana seluruhnya di tahun 2024 dengan predikat sangat baik.

Tabel 3.39 : Realisasi APBD SKPD Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	4	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-
2.	BELANJA DAERAH	15.050.625.689	13.690.453.242	1.360.172.447
2.1.	BELANJA OPERASI	12.128.280.092	10.903.540.717	1.224.739.375
	- Belanja Pegawai	4.058.545.453	3.294.111.538	764.433.915
	- Belanja Barang dan Jasa	8.069.734.639	7.609.429.179	460.305.460
2.2.	BELANJA MODAL	2.922.345.597	2.786.912.525	135.433.072
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.651.253.325	2.534.008.125	117.245.200
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	171.192.272	167.404.400	3.787.872
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0
	- Belanja Modal Aset Tatap Lainnya	99.900.000	85.500.000	14.400.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	15.050.625.689	13.690.453.242	1.360.172.447

Dilihat dari pendapatan yang diperoleh dan realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 ini masih mengalami **SILPA** anggaran pembiayaan sebesar **Rp. 1.360.172.447,-** (*Satu milyar tiga ratus enam puluh juta seratus ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*).

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

- Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.40 Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

No.	Sasaran	Program	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	6.532.835.741	5.537.415.628	84,76 %
II	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.213.954.566	4.042.796.794	95,94 %
III		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.005.986.388	3.846.351.500	96,02 %
IV		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	88.484.570	74.789.320	84,52 %
V		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	209.364.424	189.100.000	90,32 %
		Jumlah	15.050.625.689	13.690.453.242	90,96 %

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran Strategis tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Keuangan	Efisiensi
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pencapaian domain SPBE	97,5%	90,96%	6,54%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP SKPD	101,36%	84,76%	16,6%

Berdasarkan tabel Tabel 3.40 dan tabel 3.41 di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator dengan persentase 90,96%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran yang cukup tinggi, yaitu pada Nilai SAKIP SKPD dengan Tingkat efisiensi sebesar 16,6%. Hal ini terjadi karena pelaksanaan kegiatan atas pemenuhan tata kelola atau implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan dengan baik dalam mendukung pencapaian target kinerja dinas yang telah disusun.

Pencapaian realisasi indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan dari internal yaitu komitmen dari seluruh pegawai yang telah bekerja keras berupaya agar pencapaian target bisa terpenuhi 100% secara fisik kegiatan. Anggaran pelaksanaan kegiatan untuk pemenuhan pengelolaan umum dan kepegawaian serta pelaksanaan implementasi SAKIP Dinas telah terealisasi 84,76% sehingga pemerintah daerah memiliki SILPA dari kegiatan tersebut. Adapun SILPA tersebut sebagian besar berasal dari sub kegiatan penyediaan gaji pegawai, yang disebabkan adanya kekosongan jabatan pimpinan tinggi Diskominfo selama 9 bulan serta adanya mutasi 1 orang ASN di tahun 2024.

Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran seluruh indikator telah menunjukkan efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja. Artinya pada pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan masing-masing indikator tersebut tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan hanya anggaran sisa yang tidak terserap yang merupakan efisiensi anggaran.

Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran hanya terdapat satu indikator yang dianggap kurang optimal yaitu indikator kinerja utama Diskominfo yaitu Persentase pencapaian domain SPBE, di mana dari pencapaian kinerja tidak memenuhi target sebagaimana ditetapkan yaitu hanya 97,5% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran/keuangan mencapai 90,96% yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp. 13.690.453.242,- yang dialokasikan pada 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Dalam hal penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dari sisi kepegawaian memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai jumlah ASN sebanyak 20 (dua puluh) orang. Untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan sumber daya manusia/susunan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 41 orang yang terdiri dari 18 orang PNS, 2 orang PPPK dan 21 orang Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang meliputi : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Komunikasi, Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government*, Kepala Bidang Statistik dan Pesandian, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kepala Seksi Pengelolaan Statistik, Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi, fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Muda 2 orang, staf pelaksana/fungsional umum 10 orang serta tenaga Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 21 orang. Masing-masing pegawai telah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Penggunaan sumber daya berupa sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam

mendukung pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2024 sudah mencukupi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun akan terus ditingkatkan guna peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik. Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai target indikator kinerja, antara lain:

1. Jaringan Intra antar SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
2. Akses Internet terpadu Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
3. Ruang *Network Operation Center* (NOC);
4. Gedung Command Center Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
5. Akses komunikasi dengan 1 unit tower pemancar radio;
6. Portal Website Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
8. Studio LPPL Radio Tuntung Pandang Tanah Laut.
9. Aplikasi Layanan data statistik dan Layanan keamanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

3. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Tabel 3.42 Realisasi APBD Tahun 2023 dan 2024

No	Tahun 2023				Tahun 2024			
	Program/Kegiatan (sub kegiatan)	Anggaran	Realisasi	%	Program/Kegiatan (sub kegiatan)	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.900.000	2.900.000	100,00	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.942.225	2.750.000	93,47
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.979.315	1.850.000	93,47
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000	900.000	100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	962.910	900.000	93,47
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.840.388.971	3.232.248.075	84,16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.062.544.866	3.297.628.438	81,17
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.836.888.971	3.229.887.314	84,18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.058.545.453	3.294.111.538	81,16
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.500.000	2.360.761	67,45	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.999.413	3.516.900	87,94
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	29.200.000	97,33
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	29.200.000	97,33
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.977.569	431.726.053	96,59	Administrasi Umum Perangkat Daerah	646.390.825	609.669.695	94,32

4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.683.943	6.130.000	91,71	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.594.083	6.777.000	89,24
4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	91.113.045	85.465.400	93,80	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	194.064.669	181.051.800	93,29
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.080.527	8.881.300	88,10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.933	9.110.000	91,10
4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.500.054	15.178.000	91,99	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.999.622	11.293.200	75,29
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	4.560.000	84,44
4.6	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	9.825.000	98,25	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	14.800.000	98,67
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.000.000	303.166.353	98,11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.095.000	381.877.695	95,69
4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	237.518	200.000	84,20
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.218.182	23.231.000	95,92	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.001.949	158.139.525	93,02
5.1	Pengadaan Mebel	-	-	-	Pengadaan Mebel	49.979.442	43.858.125	87,75
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.557.507	26.280.000	88,91
5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.218.182	23.231.000	95,92	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.465.000	88.001.400	97,28
5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	753.640.076	722.189.034	95,83	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.483.240.076	1.322.776.867	89,18
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.000.000	164.333.274	86,04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.000.000	177.732.260	70,25

6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.640.076	557.855.760	99,15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.230.240.076	1.145.044.607	93,07
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.450.000	107.926.800	83,37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.715.800	117.251.103	85,14
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000	32.907.000	80,26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.300.000	31.331.003	94,09
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.000.000	58.569.800	81,35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.815.800	60.021.100	95,55
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.450.000	16.450.000	100,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.600.000	16.200.000	82,65
7.4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000	9.699.000	44,09
7.5	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	-	-	-	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.525.009.634	3.158.421.719	89,60	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.213.954.566	4.042.796.794	95,94
8.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	-	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	21.996.500	15.990.000	72,69
8.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100.021.919	91.526.250	91,51	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	50.000.000	37.310.000	74,62

8.3	Pengelolaan Media Komunikasi publik	2.983.994.515	2.634.854.500	88,30	Pengelolaan Media Komunikasi publik	2.188.320.000	2.101.396.989	96,03
8.4	Pelayanan Informasi Publik	440.993.200	432.040.969	97,97	Pelayanan Informasi Publik	351.550.000	297.429.305	84,61
8.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	29.981.828	23.150.500	77,22
8.6	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1.572.106.238	1.567.520.000	99,71
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
9	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.344.058.342	5.989.993.560	94,42	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.901.586.388	3.757.251.500	96,30
9.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.344.058.342	5.989.993.560	94,42	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.901.586.388	3.757.251.500	96,30
10	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	166.000.000	130.350.000	78,52	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	104.400.000	89.100.000	85,34
10.1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	166.000.000	130.350.000	78,52	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	104.400.000	89.100.000	85,34
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			

11	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	32.276.510	30.020.000	93,01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	88.484.570	74.789.320	84,52
11.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	32.276.510	30.020.000	93,01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19.584.570	19.582.570	99,99
11.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	-	-	-	Membangun Metadata Statistik Sektoral	28.400.000	21.706.750	76,43
11.3	Pengembangan Infrastruktur	-	-	-	Pengembangan Infrastruktur	40.500.000	33.500.000	82,72
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
12	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.685.000	16.185.000	91,52	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	209.364.424	189.100.000	90,32
12.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.636.786	40.515.000	95,02
12.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.685.000	16.185.000	91,52	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	166.727.638	148.585.000	89,12
	JUMLAH	15.282.604.284	13.845.191.241	90,59	JUMLAH	15.050.625.689	13.690.453.242	90,96

Dari tabel perbandingan realisasi anggaran capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 dengan Tahun 2024 di atas dapat dilihat bahwa belanja tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp 15.282.604.284,- telah terealisasi sebesar Rp 13.845.191.241,- dengan persentase 90,59 % sedangkan pada tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 15.050.625.689,- telah terealisasi sebesar Rp 13.690.453.242,- dengan persentase 90,96 %. Dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,37 %. Meskipun demikian, pagu anggaran belanja yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2024

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Koordinasi antar instansi belum cukup optimal dalam mendukung terlaksananya implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

4. Masih adanya beberapa wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur telekomunikasi atau akses internet, sehingga menghambat penggunaan layanan *e-government* di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu jika memungkinkan.
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan membentuk tim internal evaluasi mandiri SPBE dalam rangka pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut dengan menyusun jadwal kegiatan evaluasi mandiri.
4. Melakukan perencanaan jangka panjang terhadap pembuatan tower menara telekomunikasi induk untuk mengcover area blankspot jaringan di beberapa wilayah dan Desa se-Kabupaten Tanah Laut ataupun melakukan koordinasi dengan pihak ketiga terkait penyediaan layanan internet menggunakan jaringan lastmile.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Dalam perseptif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, yang dalam hal ini juga berarti bahwa kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan **realisasi fisik 99,43%** dan **realisasi keuangan 90,96 %**, dengan kategori capaian realisasi fisik **sangat tinggi** dan realisasi keuangan **sangat tinggi**, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Kurangnya komitmen para *leader* pada SKPD untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Memberi dukungan kepada para *leader* pada SKPD untuk menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah menyusun Dokumen arsitektur SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang meliputi sebagai berikut:

1. Tanah Laut *Smart Government* dan *Smart City*

Tanah Laut *Smart Government* meliputi *smart* perencanaan, monitoring, evaluasi, pembangunan kapasitas, serta implemetasi kebijakan. Sedangkan *Smart City* memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Tanah Laut memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tanah Laut *Smart city* meliputi penyediaan layanan pemerintahan, *public safety*, kependudukan *online*, *security surveilane*, *smart* UKM (pengusaha kecil dan menengah), layanan *digital park* (perpustakaan digital, konten pendidikan *online*) dan lain sebagainya. Pelaksanaannya terbagi dalam dua tahapan yaitu pada pembangunan *Smart Government* dan Pembangunan fasilitas *Smart City*.

2. Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Yang Berbasis Data

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan tahapan perencanaan dan pembangunan *data/command center* serta

jaringan fiber optik antar SKPD dan tower bersama sebagai infrastruktur penunjang dalam mendukung *Smart Government* dan *Smart City*.

3. Pelaksanaan dan Penerapan kaidah-kaidah SPBE.

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 31 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan SPBE yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

4. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

5. Pemanfaatan Layanan Keamanan Informasi

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat perlu direspon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersikap responsif dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat rentan akan penyalahgunaan baik data maupun dokumen. Untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga diperlukan

adanya kebijakan terkait keamanan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut



DINA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP. 19860320 200212 2 002